

RINGKASAN

Prosedur Penyusunan Pagu Alokasi Anggaran Kementerian Negara/Lembaga Pada Direktorat Jenderal Anggaran. Widya Ayu Pribandari NIM D42222131, Tahun 2025, Akuntansi Sektor Publik, Politeknik Negeri Jember, Khairy Rifqy, S.E., M.Sc. (Pembimbing Lapang), dan Sugeng Hartanto., S.E., M. Akun (Dosen Pembimbing Magang).

Laporan Magang ini dibuat untuk memberikan gambaran mengenai hasil kegiatan Magang yang dilaksanakan di Direktorat Jenderal Anggaran. Pelaksanaan Magang dilakukan pada awal semester VII dengan waktu 700 jam atau setara dengan penempuhan 20 sks. Salah satu bentuk proses belajar untuk mengasah keahlian dan keterampilan mahasiswa yang dilakukan Direktorat Jenderal Anggaran. Kegiatan Magang dimulai pada tanggal 1 September 2025 sampai dengan 31 Desember 2025. Direktorat Jenderal Anggaran dipilih sebagai salah satu tempat magang karena selarasnya dengan mata kuliah yang dipelajari dalam teori perkuliahan dengan pekerjaan atau keterampilan. Bagian-bagian yang dipilih sebagai lokasi magang pada Direktorat Jenderal Anggaran salah satunya yaitu Direktorat Anggaran Bidang Perekonomian dan Kemaritiman, lebih spesifik lagi penempatan lokasi magang berada pada Tim Kerja Anggaran Bidang Energi, Perindustrian, dan Perdagangan.

Berbagai macam pekerjaan keterampilan yang dilakukan pada Tim Kerja tersebut salah satunya yaitu Penyusunan Pagu Alokasi Anggaran Kementerian Negara/Lembaga. Prosedur penyusunan pagu alokasi anggaran merupakan rangkaian tahapan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Anggaran dalam menetapkan batas maksimal anggaran Kementerian Negara/Lembaga berdasarkan kebijakan fiskal dan arah penganggaran nasional. Proses ini diawali dengan penyampaian usulan anggaran oleh K/L yang dilengkapi data dukung dan rencana kerja, kemudian dilakukan penelaahan oleh DJA untuk memastikan kesesuaian dengan pagu indikatif, standar biaya, serta prinsip efisiensi dan efektivitas. Hasil penelaahan dituangkan dalam Catatan Hasil Penelaahan (Catlah) dan Daftar Hasil Penelaahan (DHP) sebagai dasar

penyempurnaan usulan anggaran, hingga akhirnya ditetapkan sebagai pagu alokasi anggaran yang menjadi acuan penyusunan RKA-K/L dan penetapan DIPA.